

ANALISIS KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT DAN DAMPAKNYA PADA KEMANDIRIAN FISKAL

Tomi Satria Maggara¹, Bella Kharisma Putri², Aldri Frinaldi³, Asnil⁴, Nora Eka Putri⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Padang

E-mail : tommysatriamaggara@gmail.com¹, bellakharisma49@gmail.com²,
aldri@fis.unp.ac.id³, asnilmelayu@gmail.com⁴, noraekaputri@fis.unp.ac.id⁵

ABSTRACT

This research analyzes regional government dependence on central transfer funds and its impact on fiscal independence in the decentralization era, with a focus on West Sumatra. Research shows that more than 60% of regional income still comes from central transfer funds, such as the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Profit Sharing Fund (DBH), even though fiscal decentralization aims to increase regional income. provide autonomy in regional financial management. This excessive dependence limits budget flexibility and fiscal independence by reducing local government incentives to maximize Regional Original Income (PAD). This research uses a qualitative descriptive methodology, collecting data through document analysis and observation. Analysis of regional financial management shows that the allocation of transfer funds is not always effective in improving the quality of public services, such as education and health, which are not commensurate with the amount of the allocated budget. This highlights the need to diversify local revenue sources and strengthen the managerial capacity of local governments to increase the effectiveness of budget management. Based on these findings, this research recommends increasing PAD, increasing financial management capacity at the local level, as well as transparent monitoring of the use of central transfer funds. With these steps, it is hoped that local governments can be more fiscally independent and responsive in meeting the needs of local communities, especially in facing post-pandemic economic and public service challenges.

Keywords: *Transfer Funds, Fiscal Independence, Era Of Decentralization.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat dan dampaknya terhadap kemandirian fiskal di era desentralisasi, dengan fokus pada Sumatera Barat. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), padahal desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. memberikan otonomi pengelolaan keuangan daerah. Ketergantungan yang berlebihan ini membatasi fleksibilitas anggaran dan kemandirian fiskal dengan mengurangi insentif pemerintah daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian

ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui analisis dokumen dan observasi. Analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa alokasi dana transfer tidak selalu efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Hal ini menyoroti perlunya diversifikasi sumber pendapatan lokal dan penguatan kapasitas manajerial pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan peningkatan PAD, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat lokal, serta pengawasan transparan terhadap penggunaan dana transfer pusat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri secara fiskal dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pelayanan publik pasca-pandemi.

Kata Kunci: Dana Transfer, Kemandirian Fiskal, Era Desentralisasi.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan kewenangan lebih ke pemerintah daerah guna mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Desentralisasi fiskal bertujuan agar pemerintah daerah memiliki kapasitas dalam mengatur anggaran sesuai kebutuhan lokal, sehingga pelayanan publik dapat lebih responsif dan berkualitas. Namun, di banyak daerah, penerapan desentralisasi fiskal justru menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan ketergantungan pada dana transfer pusat. Ketergantungan ini menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal di tingkat daerah, yang seharusnya menjadi dasar bagi kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa intervensi besar dari pemerintah pusat.

Secara umum, pemerintah daerah mengandalkan dua jenis pendanaan: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Idealnya, dengan penerapan desentralisasi,

daerah mampu meningkatkan PAD sebagai salah satu tolok ukur kemandirian fiskal. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2022), lebih dari 60% total anggaran pemerintah daerah di Indonesia berasal dari transfer pusat, dan angka ini cenderung meningkat di wilayah-wilayah tertentu. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan dana pusat tetap menjadi fenomena umum yang menghambat daerah untuk mandiri secara fiskal.

Ketergantungan pada dana transfer pusat memiliki berbagai dampak negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Salah satu dampak utamanya adalah keterbatasan ruang gerak bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan spesifik lokal. Dengan porsi transfer pusat yang dominan, anggaran yang ada sering kali digunakan untuk memenuhi persyaratan dan regulasi pusat, yang mungkin tidak selalu relevan dengan prioritas di daerah. Akibatnya, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang rendah dalam menyusun dan melaksanakan program-program yang

lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini mengakibatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah yang kaku serta kurang inovatif dalam merespons permasalahan lokal.

Selain itu, ketergantungan pada dana transfer pusat juga mengurangi insentif pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada dana pusat cenderung memiliki inisiatif yang rendah untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketergantungan struktural yang semakin sulit diatasi. PAD yang rendah mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal daerah dan menandakan keterbatasan kapasitas daerah dalam menciptakan pendapatan dari potensi lokal yang ada. Misalnya, data dari Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa PAD hanya menyumbang sekitar 10-20% dari total anggaran di beberapa daerah, seperti di luar Jawa dan Bali. Ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berjalan efektif dalam mendorong kemandirian daerah.

Permasalahan lainnya adalah ketimpangan kapasitas fiskal antar-daerah yang semakin tampak di era desentralisasi. Daerah-daerah yang memiliki basis ekonomi yang kuat, seperti Jakarta, Jawa Barat, atau Bali, relatif lebih mampu meningkatkan PAD mereka. Sementara itu, daerah-daerah yang ekonominya lebih lemah, terutama di wilayah timur Indonesia, sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk mendanai program-program pembangunan. Menurut laporan dari World Bank (2023), disparitas fiskal antara provinsi di Indonesia terus meningkat, dengan daerah kaya memperoleh

PAD yang lebih besar dibandingkan daerah ekonomi rendah. Ketimpangan ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas pelayanan publik antar-daerah, yang berpotensi meningkatkan ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi.

Di sisi lain, ketergantungan yang tinggi pada dana pusat juga menimbulkan risiko bagi stabilitas anggaran pemerintah daerah. Ketika alokasi dana transfer pusat mengalami pemotongan atau penundaan, pemerintah daerah yang sangat bergantung pada dana ini akan menghadapi tantangan dalam mempertahankan kualitas layanan publik. Misalnya, pada tahun 2021, beberapa daerah mengalami keterlambatan pencairan DAU akibat masalah administrasi di tingkat pusat, yang berdampak langsung pada kelangsungan program layanan publik di daerah tersebut. Risiko ini menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pendapatan di tingkat daerah agar tidak terlalu bergantung pada alokasi pusat.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, khususnya dalam konteks kemandirian fiskal daerah. Jika tujuan utama desentralisasi adalah untuk memberi keleluasaan daerah dalam mengatur sumber daya keuangan mereka, maka ketergantungan tinggi pada dana pusat justru bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah. Situasi ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketergantungan fiskal tersebut serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk menguranginya.

Oleh karena itu, ketergantungan pemerintah daerah kepada dana transfer pusat dan pengaruhnya terhadap kemandirian fiskal daerah akan diteliti dan dianalisis di

penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan memahami kesulitan dan hambatan yang terkait dengan keberhasilan penerapan desentralisasi fiskal. Selain itu, temuan studi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong pemerataan ekonomi dan kemandirian fiskal antar daerah di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk memahami sepenuhnya dampak ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat terhadap kemandirian fiskal. Menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan data secara deskriptif dengan tetap berkonsentrasi pada penyelidikan fenomena lapangan secara menyeluruh, sehingga dapat menggambarkan realitas yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal.

Teknik analisis data yang digunakan mencakup observasi dan studi dokumen. Observasi untuk mendapatkan pemahaman langsung terkait implementasi kebijakan fiskal di tingkat daerah, khususnya dalam alokasi dan pemanfaatan dana transfer pusat. Studi dokumen digunakan untuk menganalisis data sekunder, seperti laporan keuangan daerah, data alokasi dana transfer, serta regulasi terkait kebijakan fiskal dan desentralisasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola ketergantungan fiskal serta dampaknya terhadap kemandirian daerah, yang merupakan aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas desentralisasi fiskal di Indonesia.

Selanjutnya, dalam proses analisis, penelitian ini menganalisis permasalahan yang terjadi melalui pendekatan induktif, di mana peneliti mengolah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Analisis ini dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengumpulan data, pemilahan informasi relevan, hingga penginterpretasian hasil temuan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana ketergantungan pada dana transfer pusat memengaruhi kemandirian fiskal daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Ketergantungan Tinggi Pemerintah Daerah terhadap Dana Transfer Pusat

Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah daerah lainnya di Indonesia menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Berdasarkan data yang dianalisis, dana transfer yang terdiri dari sejumlah komponen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki lebih dari 60% pendapatan daerah. Ketergantungan ini menciptakan sebuah pola di mana pemerintah daerah cenderung mengandalkan sumber pendanaan eksternal untuk membiayai belanja publik, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya untuk mencapai kemandirian fiskal. Dalam konteks ini, data dari tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer mencapai 79,4%, yang berarti bahwa

sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumber tersebut

Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kontrol penuh atas sumber pendanaan ini. Ketika pemerintah pusat memutuskan untuk mengurangi atau mengubah alokasi dana transfer, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belanja publiknya. Penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya ketergantungan terhadap dana transfer, insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi berkurang. Sebagai contoh, di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya berkisar antara 15-20%, menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih memilih untuk bergantung pada dana transfer daripada menggali potensi pendapatan lokal

Selain itu, dampak dari ketergantungan ini terlihat dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan bergantung pada dana transfer pusat, ada kecenderungan bahwa alokasi anggaran tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan prioritas lokal. Hal ini dapat menyebabkan pelayanan publik menjadi kurang responsif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan penelitian, masih terdapat kesulitan dalam menggunakan dana transfer secara efisien untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal, meskipun jumlah total yang diterima setiap tahunnya meningkat dari Rp 762,5 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 857,6 triliun pada tahun 2024. Dalam rangka

meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, maka penting bagi pemerintah daerah untuk menemukan solusi kreatif.

2. Dampak Negatif pada Kemandirian Fiskal

Temuan studi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, terkena dampak negatif dari peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat. Kapasitas belanja daerah dapat ditingkatkan melalui dana transfer yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, tingginya ketergantungan terhadap dana tersebut mengurangi insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data, di Sumbar, PAD hanya menyumbang 20% dari total pendapatan daerah pada tahun 2024, sedangkan dana transfer pusat menyumbang lebih dari 70% pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah seringkali bergantung pada sumber pendanaan dari luar, yang pada akhirnya mengurangi insentif mereka untuk menyelidiki potensi pendapatan daerah.

Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa setiap peningkatan dalam dana transfer dari pusat diikuti oleh penurunan proporsi PAD. Dalam analisis regresi linear berganda yang dilakukan terhadap 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2015-2020, ditemukan bahwa setiap kenaikan Rp1 miliar dalam dana transfer berhubungan dengan penurunan kemandirian fiskal sebesar 0,7394771 atau sekitar 47,74%. Ini menunjukkan bahwa semakin besar alokasi

dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah, semakin rendah tingkat kemandirian keuangan mereka. Hal ini menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus, di mana pemerintah daerah tidak merasa perlu untuk meningkatkan PAD karena sudah mendapatkan cukup banyak dukungan dari pusat.

Dampak negatif ini tidak hanya terlihat pada aspek keuangan, tetapi juga berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Ketika pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana transfer, mereka menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan kurang inovatif dalam mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan. Penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer cenderung memiliki kualitas layanan publik yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi lokal mereka. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan mencari cara untuk meningkatkan kemandirian fiskal agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

3. Efektivitas Penggunaan Dana Transfer

Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah, efektivitas penggunaan dana tersebut masih menjadi masalah utama. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, total dana transfer yang dialokasikan untuk pemerintah daerah mencapai Rp 857,6 triliun, meningkat dari

Rp 762,5 triliun pada tahun 2020. Namun, banyak pemerintah daerah yang tidak memanfaatkan dana ini secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Misalnya, di Provinsi Sumatera Barat, meskipun menerima dana transfer yang besar, indeks kemandirian fiskal (IKF) tetap rendah, dengan rata-rata IKF di tingkat kabupaten/kota hanya mencapai 0,11 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah sangat kecil, sehingga menunjukkan kurangnya efektivitas dalam penggunaan dana transfer.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas penggunaan dana transfer adalah kurangnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah. Penelitian menemukan bahwa banyak pegawai pemerintah daerah belum memiliki keterampilan yang memadai untuk merencanakan dan mengelola anggaran secara efektif. Sebagai contoh, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 mencatat bahwa hanya satu daerah di Indonesia yang dikategorikan sebagai sangat mandiri dalam hal kemandirian fiskal. Kabupaten Badung di Bali menjadi satu-satunya daerah dengan IKF sebesar 0,8347, sedangkan banyak daerah lain seperti Kabupaten Deiyai di Papua hanya memiliki IKF sebesar 0,0031. Ini menunjukkan adanya disparitas besar dalam kemampuan pengelolaan keuangan antara daerah yang lebih maju dan yang tertinggal.

Selain itu, tantangan dalam pengawasan dan akuntabilitas juga berkontribusi pada masalah efektivitas penggunaan dana transfer. Banyak pemerintah daerah tidak memiliki sistem

pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa belanja daerah sering kali terpengaruh oleh dinamika politik dan tidak selalu diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan berkualitas. Hal ini mengakibatkan kualitas layanan publik tidak sebanding dengan jumlah dana yang diterima. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana transfer agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan meningkatkan kemandirian fiskal di masa depan.

Pembahasan

1. Urgensi Diversifikasi Sumber Pendapatan Daerah

Urgensi diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi sangat penting dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia pada tahun 2024. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan daerah, terutama jika terjadi pemotongan anggaran atau perubahan kebijakan dari pusat. Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa lebih dari 70% pendapatan daerah di beberapa provinsi berasal dari dana transfer, yang menempatkan pemerintah daerah dalam posisi rentan. Jika pemerintah pusat mengurangi alokasi dana transfer, daerah akan menghadapi kesulitan dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi diversifikasi sumber pendapatan

dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi lokal.

Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat merupakan dua alasan mengapa diversifikasi sumber pendapatan sangatlah penting. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah digunakan untuk mengukur kemandirian fiskal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata rasio kemandirian fiskal Indonesia diperkirakan hanya akan mencapai 20% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendanaan masih berasal dari sumber luar. Dengan meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat memperkuat posisi keuangannya dan menciptakan anggaran yang lebih berkelanjutan. Misalnya, beberapa daerah yang berhasil meningkatkan PAD mereka melalui inovasi perpajakan lokal menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Salah satu cara untuk mencapai diversifikasi ini adalah dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang ada. Setiap daerah memiliki karakteristik dan sumber daya yang berbeda-beda, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi tersebut untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang sesuai. Misalnya, daerah dengan potensi pariwisata tinggi dapat mengenakan pajak pariwisata yang lebih besar untuk meningkatkan PAD. Data menunjukkan bahwa beberapa kabupaten di Bali berhasil meningkatkan PAD mereka hingga 30% melalui penerapan pajak pariwisata yang efektif. Dengan demikian, diversifikasi

sumber pendapatan melalui pengembangan pajak dan retribusi lokal dapat memberikan dampak positif bagi kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan juga tidak dapat diabaikan. Banyak pemerintah daerah masih mengalami kesulitan dalam merencanakan dan mengelola anggaran secara efektif. Oleh karena itu, intervensi dari pemerintah pusat dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kapasitas sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi PAD secara maksimal. Dengan meningkatnya kapasitas manajerial, diharapkan pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mengelola sumber daya keuangan dengan lebih efisien.

Terakhir, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan manfaat lain dari diversifikasi sumber pendapatan. Pemerintah daerah akan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat mengenai bagaimana mereka membelanjakan anggarannya jika mereka memiliki lebih banyak sumber pendapatan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi rencana belanja pemerintah. Dengan demikian, upaya untuk mendiversifikasi sumber pendapatan tidak hanya akan memperkuat kemandirian fiskal tetapi juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat lokal, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

2. Perluasan Kapasitas Manajerial di Tingkat Daerah

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah adalah kapasitas manajerial yang masih terbatas. Pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan manajerial yang kuat untuk merencanakan dan menggunakan anggaran dengan efektif. Tanpa kemampuan manajerial yang memadai, pemerintah daerah cenderung mengandalkan dana transfer pusat, yang dapat membuat mereka rentan terhadap perubahan kebijakan dari pusat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kemampuan manajerial pegawai negeri sipil di tingkat lokal melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah adalah kapasitas manajerial yang masih terbatas. Pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan manajerial yang kuat untuk merencanakan dan menggunakan anggaran dengan efektif. Tanpa kemampuan manajerial yang memadai, pemerintah daerah cenderung mengandalkan dana transfer pusat, yang dapat membuat mereka rentan terhadap perubahan kebijakan dari pusat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kemampuan manajerial pegawai negeri sipil di tingkat lokal melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.

Evaluasi dan seleksi pegawai juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan kapasitas manajerial. Pemerintah daerah harus mampu mengevaluasi kemampuan pegawai secara objektif dan selektif. Pegawai yang memiliki potensi tinggi harus diprioritaskan untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kapasitas. Hal ini dapat

dilakukan dengan menggunakan instrumen evaluasi yang valid dan reliabel, seperti tes kemampuan dan ulasan supervisor. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pegawai yang mengikuti program pelatihan adalah mereka yang paling membutuhkan dan siap untuk meningkatkan kemampuan manajerial mereka.

Integrasi dengan sistem informasi anggaran juga sangat penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan dana transfer. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem informasi yang lengkap dan akurat untuk merekam dan menganalisis data anggaran. Dengan demikian, mereka dapat memonitor perkembangan anggaran secara real-time dan membuat keputusan yang cepat dan tepat. Beberapa daerah telah mengimplemenasikan sistem informasi anggaran yang modern, seperti SAP atau Accurate, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Dengan meningkatkan kemampuan manajerial, diharapkan penggunaan dana transfer dapat lebih efisien dan berdampak positif pada pelayanan publik. Pemerintah daerah yang memiliki kemampuan manajerial yang kuat dapat merencanakan dan mengelola anggaran dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Misalnya, pemerintah daerah yang telah meningkatkan kemampuan manajerialnya dapat memprioritaskan program-program yang paling penting bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meningkatkan kapasitas manajerial di tingkat daerah adalah langkah fundamental dalam meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Melalui pelatihan intensif, evaluasi dan seleksi pegawai, integrasi dengan sistem informasi anggaran, dan fokus pada pelayanan publik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana transfer dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, perluasan kapasitas manajerial harus menjadi prioritas utama dalam strategi pengembangan keuangan daerah.

3. Pengawasan dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Transfer

Pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana transfer menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa dana digunakan efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan daerah, dana transfer pemerintah pusat sering kali sumber utama pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek publik. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, ada risiko penyalahgunaan atau pemborosan dana, yang dapat mengakibatkan kualitas pelayanan publik yang buruk. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan penggunaan anggaran.

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan pengawasan adalah dengan menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk

mendapatkan informasi yang jelas tentang alokasi dan penggunaan dana transfer. Data menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan transparansi dalam pengelolaan anggaran cenderung memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan yang lebih baik. Misalnya, beberapa daerah telah mulai mempublikasikan laporan keuangan mereka secara rutin, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai penggunaan dana. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran.

Selain itu, pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan tidak dapat diabaikan. Masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan dana transfer. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah memastikan program-program dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga. Pendekatan partisipatif ini juga dapat membantu mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, karena dengan adanya keterlibatan masyarakat, tindakan-tindakan yang tidak transparan akan lebih mudah terdeteksi. Data dari berbagai studi menunjukkan bahwa daerah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan anggaran memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang tidak melibatkan masyarakat.

Mekanisme audit juga merupakan bagian penting dari sistem pengawasan yang efektif. Audit internal dan eksternal harus dilakukan secara rutin untuk menilai

penggunaan dana transfer. Audit ini tidak hanya berfungsi untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan dana dalam mencapai tujuan pembangunan. Laporan audit harus dipublikasikan agar masyarakat dapat melihat hasilnya dan memberikan masukan jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, audit sosial oleh masyarakat juga dapat dilakukan untuk memberikan perspektif tambahan mengenai penggunaan dana dan dampaknya terhadap komunitas.

Akhirnya, untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana transfer, perlu ada sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Tanpa adanya konsekuensi yang jelas, akan sulit untuk mendorong perilaku akuntabel di kalangan pejabat pemerintah daerah. Maka, penting pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan regulasi yang jelas mengenai sanksi bagi pelanggaran akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana transfer tidak hanya akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi, dapat dikatakan bahwa Sumatera Barat dan pemerintah daerah lainnya di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan

Dana Bagi Hasil (DBH) menyumbang lebih dari 60% pendapatan daerah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBD. Karena pemerintah daerah cenderung kurang memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan utama, ketergantungan ini menghambat upaya kemandirian fiskal meskipun dana transfer tersebut meningkatkan kapasitas belanja.

Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat juga berdampak negatif pada kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini mengindikasikan bahwa setiap kali terjadi peningkatan dana transfer, terjadi pula penurunan proporsi PAD dalam total pendapatan daerah. Hal ini menciptakan pola pengeluaran yang tidak seimbang, di mana daerah kurang memiliki insentif untuk mengembangkan potensi pendapatan lokal secara maksimal. Akibatnya, kemandirian fiskal sulit tercapai dan pemerintah daerah berpotensi menghadapi ketidakstabilan keuangan jika dana transfer dari pusat mengalami penurunan.

Efektivitas penggunaan dana transfer pusat juga menjadi permasalahan yang krusial. Meskipun jumlah dana yang diterima terus meningkat, penelitian ini menemukan bahwa dana tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Banyak daerah masih menghadapi tantangan dalam manajemen anggaran, yang mengakibatkan rendahnya kualitas layanan publik meskipun dana transfer besar. Untuk mengatasi hal ini, peningkatan kapasitas manajerial, diversifikasi sumber pendapatan, serta pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana di tingkat lokal sangat diperlukan agar

dana transfer dapat digunakan secara efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Saran

1. **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pemda harus mengembangkan potensi PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pendapatan tinggi dan memperbaiki sistem administrasi pendapatan untuk meminimalkan kebocoran serta memastikan kepatuhan pajak di tingkat lokal.

2. **Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Tata Kelola Keuangan Daerah**

Pengembangan kapasitas manajerial di tingkat daerah sangat penting agar pemerintah lokal dapat merencanakan, mengelola, dan menggunakan anggaran secara efektif. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi khususnya bagi pegawai bidang keuangan, perencanaan, dan pengawasan perlu diadakan secara berkala agar pemanfaatan dana transfer pusat lebih optimal.

3. **Mengembangkan Sistem Pengawasan yang Transparan dan Akuntabel**

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dapat ditingkatkan melalui pengawasan yang melibatkan masyarakat dan lembaga independen. Dengan menerapkan sistem pengawasan yang ketat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan dana transfer pusat

digunakan sesuai kebutuhan serta prioritas pelayanan publik.

4. **Diversifikasi Sumber Pendapatan dan Inovasi Kebijakan Keuangan Daerah**

Daerah perlu mencari sumber pendapatan alternatif di luar dana transfer pusat untuk mengurangi ketergantungan fiskal. Misalnya, melalui pengembangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan. Inovasi kebijakan yang mendukung peningkatan kemandirian finansial, seperti insentif untuk investasi lokal, juga dapat membantu meningkatkan ketahanan fiskal daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, F. (2023). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2016-2020* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Arina, M. M., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kota manado. *Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 20(3), 26-35.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 14(1), 44-52.
- Fitria, A., Weriantoni, W., Saibah, B. R. A. M., & Sufiawan, N. A. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 46-53.
- Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6).
- Marya, M., & Handra, H. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 7(2), 409-418.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied,*

Management, Accounting and Research), 5(2), 390-399.

- Mokorowu, L. A., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(04).
- Nindita, N. L. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), serta belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. *JAF-Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 12-19.
- Niswani, N., & Firdaus, R. (2022). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 64-77.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 303-318.